



RILIS

KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VIII DPR RI MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024 – 2025 KE PROVINSI JAWA TENGAH TANGGAL 6 – 10 DESEMBER 2024

Komisi VIII DPR RI pada masa persidangan I tahun sidang 2024 – 2025, mulai tanggal 6 sampai dengan 10 Desember 2024 melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Jawa Tengah, dengan lokus pada 4 lokasi, yakni pertemuan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, pertemuan dengan KPM PKH di Dinas Sosial Jateng, kunjungan lokasi rencana pembangunan asrama haji di Demak Jateng, dan Dialog pertemuan progres peningkatan status IAIN menjadi UIN Sunan Kudus di Kampus IAIN Kudus, Kunker reses dipimpin oleh Bapak Abdul Wachid, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Daerah Pemilihan Jawa Tengah II, beserta beberapa Anggota Komisi VIII DPR RI yang mengikuti acara kunjungan reses.

Kunker Reses Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah menghasilkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menjalankan fungsi pengawasan Komisi VIII DPR RI dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dalam bentuk menyaksikan langsung kinerja mitra dan penerima manfaat, seperti : penyelenggaraan rehabilitasi sosial dalam panti yang memenuhi SPM melalui 56 panti Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial kepada sebanyak 4.610 penerima manfaat di Panti Pemprov Jateng, memberikan subsidi permakanan bagi 4.450 penerima manfaat pada Panti Swasta di Jateng, memberikan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) kepada 12.764 penerima manfaat program Kartu Jateng Sejahtera (KSJ) yang mendapatkan bantuan sebesar Rp 370.000 per bulan, meningkatkan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), meningkatkan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui bintek, memberikan tali asih sebesar Rp 1.000.000,- per bulan kepada 574 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Jawa Tengah.
2. Kesiapsiagaan penanganan Bencana yang menjadi tugas pokok BNPB turut serta mendampingi Komisi VIII DPR RI dalam kunjungan kerja tersebut adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP). Penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah ada beberapa cara yaitu pola penanganan terhadap bencana, pola koordinasi lintas sektor, serta kendala yang dihadapi. Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus melalui APBD dan memanfaatkan sumber pembiayaan alternatif melalui dana CSR dari perusahaan, dana zakat dan sumbangan sosial dari masyarakat dan lembaga non-pemerintah dan kemitraan dengan NGO untuk penyediaan logistik, medis, dan program rehabilitasi.
3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai mitra strategis Komisi VIII DPR RI, dalam rangka memperkuat kinerja sampai akar rumput atas upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, disalurkan melalui DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik secara konsisten sebanyak Rp 406 juta dengan tingkat realisasi yang sudah mencapai 85,68% hingga November 2024. Tingkat kekerasan Perempuan dan Anak masih terbilang tinggi, langkah pencegahan bisa dilakukan melalui kampanye

anti kekerasan, pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dan penguatan Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan bersama jejaring layanan perlindungan.

4. Pelayanan keagamaan dan pendidikan keagamaan Kemenag RI, melalui Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah khususnya pada pendidikan madrasah dan pesantren, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, zakat dan wakaf mempunyai 4 program di tahun 2024 meliputi program PAUD dan wajib belajar 12 tahun, program kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama, program kualitas pengajaran dan pembelajaran, program dukungan manajemen dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.712.373.138.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.272.306.763.798,- / 74,3% (per tanggal 02 Desember 2024).

Terdapat 582 KUA di seluruh wilayah Jawa Tengah dengan jumlah 237 dalam kondisi baik, 274 rusak ringan, 71 rusak berat. 157 KUA telah direvitalisasi, sementara 425 KUA lainnya masih menunggu perbaikan. Jateng memanfaatkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk pembangunan 165 KUA, namun masih ada 417 yang belum terfasilitasi.

Pelayanan pendidikan madrasah dan pesantren terus ditingkatkan melalui sistem pengelolaan berbasis data dengan pemetaan kompetensi guru terhadap 79.456 tenaga pendidik, serta realisasi 100% program peningkatan mutu guru melalui block grant MEQR dengan anggaran insentif guru keagamaan senilai Rp 277 miliar.

Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) berhasil mengumpulkan Rp 91,7 miliar per Agustus 2024 dengan target RP 101 miliar hingga akhir tahun yang disalurkan kepada 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorim, fisabilillah dan Ibnu Sabil untuk mendukung berbagai program sosial dan pendidikan.

Penerapan teknologi e-AIW melalui aplikasi SIWAK dapat mempermudah pengelolaan dengan 112.834 bidang wakaf tercatat hingga 2024 yang sudah bersertifikat wakaf ada 78.492, sedangkan yang belum bersertifikat wakaf ada 34.342. BWI dalam hal ini terlibat aktif dalam membuat surat rekomendasi untuk Kanwil Kemenag Provinsi Jateng (RUTR) maupun Menteri Agama (NON_RUTR). Progres sudah mencapai 97,7% hampir mencapai 100%. Dari Total Objek Wakaf terdapat 242 objek dan sampai sekarang yang sudah terbit izin Kemenag terdapat 212, yang belum terbit izin Kemenag terdapat 15, dan yang masih dalam proses penggantian terdapat 10 objek wakaf.

Untuk kuota haji tahun 2025 ini adalah 30.377 jamaah dengan pendaftar haji di Jawa Tengah mencapai 893.905 orang dengan masa tunggu keberangkatan hingga 32 tahun. 54% adalah perempuan dan 46% laki-laki dengan mayoritas berusia 51-70 tahun. Progres kesiapan penyelenggaraan haji dengan verifikasi kuota telah mencapai 70%, pembuatan paspor dan biovisa yang saat ini telah mencapai 54% dan porsi jumlah jamaah lansia sebanyak 1.519 orang mendapatkan prioritas keberangkatan.

5. Kesiapan lokasi tanah tempat rencana pembangunan asrama haji Jawa Tengah di Kabupaten Demak, hibah dari Pemda Demak ke Kemenag telah 97% progres proses hibah tukar guling milik Kemenag Jateng dan Pemda Demak, karena itu diharapkan mulai tahun 2025 sudah mulai dicanangkan *inauguration of development* asrama haji dan museum haji, lokasi yang strategis dan letak sejarah Kab. Demak sebagai kota walisongo akan memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan eko sistem ekonomi haji yang berdampak luas bagi masyarakat sekitar Kab. Demak.

Komisi VIII DPR RI mendukung terealisasinya dimulai pembangunan asrama haji pada tahun 2025, sehingga peningkatan pelayanan terhadap jemaah haji khususnya masyarakat wilayah utara Jawa Tengah dapat lebih mudah, begitu juga letak strategis lokasi rencana pembangunan asrama haji yang berada di ringroad lintasan Demak ke arah tol Bandara International Ahmad Yani hanya membutuhkan waktu 30 menit. Diharapkan tahun 2026 sudah dapat dimulai pemberangkatan jemaah haji dari Bandara International Ahmad Yani.

6. Peningkatan status IAIN Kudus menjadi UIN Sunan Kudus telah melalui tahapan yang cukup rumit dan semua bisa dilalui dengan gemilang, mulai dari kelayakan luas lahan dan sumber daya pendukung kualitas akademik kampus, ijin peningkatan status IAIN menjadi UIN Sunan Kudus sudah masuk tahap akhir yakni menunggu Keputusan Presiden. Komisi VIII DPR RI mendukung peningkatan status IAIN menjadi UIN Sunan Kudus dengan harapan tetap menjaga kualitas sebagai kampus yang mencetak generasi muda ahli agama *tafaqquh fiddin* dan memiliki keahlian di bidang sains teknologi serta ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Demikian rilis hasil kunjungan kerja reses ini disimpulkan dan direkomendasikan.

Semarang, 10 Desember 2024
Ketua Tim Kunker Reses Komisi VIII DPR RI